

THE SINO – US RELATIONSHIP : STUDI KASUS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP ONE CHINA POLICY

Oleh:

Yosias Marion Arthur Wabiser

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

marsel.arthur@gmail.com

ABSTRACT

Taiwan and china beginning conflict when the difference integrity of the two nations who desire full sovereignty to in a single nation and China making a policy of "one China policy" that is approved the two nations. when the United States established diplomatic relations with Taiwan, China considers Taiwan as a barrier Relations PRC and the United States, and in violation of the agreement "One China Policy". This research uses descriptive method, with the concept of Strategic ambiugity

Keyword: China,Taiwan,US,One China policy,strategic ambiugity

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara Cina dan Amerika Serikat mulai terjalin dengan baik dimulai pada pasca perang dingin, dimana Amerika Serikat melakukan pendekatan dengan Cina melalui kebijakan *re – approachment* oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Presiden Nixon. Adanya pendekatan ini kemudian di resmikan ke dalam Shanghai Communique di tahun 1972. Hubungan antara Cina dan AS kemudian kembali dipertaruhkan pada kasus Tiananmen Square pada tahun 1989. Hubungan yang baik dengan Cina

dipandang sangat penting oleh AS. Cina memunculkan ketertarikannya dengan hubungan AS atas dasar prinsip – prinsip yang diabadikan ke dalam 3 Joint Communique Cina – Amerika Serikat. Pendekatan – pendekatan yang dilakukan oleh AS terhadap Cina dilakukan melalui perdagangan dan HAM untuk mencapai perubahan dan mempertaruhkan kemampuan AS untuk bekerjasama dengan Cina dalam pemikiran yang sama.

Hubungan antara Sino – US juga tidak bias terhindarkan oleh konflik diantaranya Senjata dan Pengembangan Misil dimana AS melihat Cina mengurangi

keinginannya untuk menahan penyebaran nuklir, senjata kimia dan teknologi dengan menjual misil – misil Cina ke negara lain seperti Pakistan. Hubungan keamanan juga mempengaruhi hubungan antara Sino – US dimana kebijakan Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan juga merusak tujuan AS untuk mencapai stabilitas dalam wilayah tersebut. Taiwan juga menjadi salah satu pemicu utama konflik antara Cina dan AS yang disebabkan oleh penjualan senjata AS ke Taiwan dan keinginan Taiwan untuk meningkatkan status internasionalnya.

Sejak berpisah dari Cina, Taiwan sampai saat ini diakui sebagai suatu negara hanya oleh beberapa negara saja bahkan PBB hanya mengakuinya sebagai provinsi dari negara Cina. Pemerintah Cina, lantas mengeluarkan kebijakan yang dinamakan *One China Policy* dimana kebijakan ini mengeluarkan bunyi yang isinya menunjukkan bahwa hanya ada satu Cina yang berdaulat. Kebijakan ini kemudian berpengaruh terhadap hubungan antara Cina dan Amerika Serikat yang kemudian menjadi rumusan masalah dalam penulisan paper ini yang dituangkan ke dalam studi kasus mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap kebijakan *One China Policy*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan antara Sino – US dalam penerapan kebijakan Amerika Serikat terhadap *One China Policy* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari penulisan paper ini terdapat tujuan - tujuan yang ingin diperoleh diantaranya :

1. Memberikan penjelasan review bagaimana hubungan yang terjalin antara Sino – US.
2. Menjelaskan review seperti apa hubungan Sino – US pasca perang dingin dalam aspek politik, ekonomi dan isu HAM.
3. Menggambarkan hubungan antara Sino – US ke dalam sebuah studi kasus kebijakan Amerika Serikat terhadap *One China Policy*.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penulisan paper ini adalah :

1. Diharapkan dapat memahami dengan jelas bagaimana hubungan yang terjalin antara Sino – US.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman secara jelas dan pengetahuan baru mengenai hubungan Sino – US pasca perang dingin dalam aspek politik, ekonomi dan isu HAM.
3. Diharapkan dapat memberikan sumber referensi dan inspirasi bagi pembaca khususnya mengenai hubungan Sino – US pasca perang dingi melalui studi kasus yang dipaparkan.

.5 Kerangka Konseptual

Konsep *Strategic Ambiguity*

Konsep *strategic ambiguity* adalah salah satu konsep kebijakan Amerika Serikat yang berusaha mempertahankan kepentingan nasionalnya terhadap Cina dan Taiwan. Konsep ini berarti Amerika berusaha untuk membuat hubungannya berjalan baik dengan Cina dan Taiwan,

tanpa membuat satu sama lain saling terprovokasi, sehingga dapat menjaga kredibilitas, perdamaian, dan stabilitas di kawasan. Konsep ini muncul karena konflik antara PRC (Cina) dan Republic of China/ROC (Taiwan) yang memperebutkan status resmi pemerintah Cina. Meskipun Cina dan Taiwan sama-sama menyetujui *One China Policy*, namun keduanya memiliki interpretasi yang berbeda terhadap hal ini. PRC menganggap *One China Policy* sebagai sebuah kebijakan dimana PRC mengontrol sepenuhnya seluruh pemerintahan di Cina, termasuk Taiwan, yang merupakan bagian dari Cina. Sedangkan ROC menganggap *One China Policy* berarti kesatuan Cina secara geografis dan kultur. Kesatuan politik nantinya akan dicapai di masa depan yang belum spesifik kapan waktunya, dengan kesatuan ideologi antara PRC dan ROC. Taiwan terus berupaya mencari dukungan internasional agar mengakuinya sebagai sebuah negara yang memiliki kedaulatan.

Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat harus menentukan posisinya. Bagi AS, Cina adalah potensi pasar yang besar untuk bisnis, sedangkan Taiwan adalah aliansi lama yang dapat dipercaya dan menjadi parter perdagangan besar. Di satu sisi, kepentingan ekonomi AS di Cina akan terganggu jika AS memiliki konflik dengan Cina terkait status Taiwan. Namun di sisi lain, jika AS mengabaikan Taiwan maka kredibilitas AS secara internasional dan perdagangan dengan Taiwan akan terganggu. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya konsep kebijakan *strategic ambiguity*, yaitu *a policy that*

intentionally introduces uncertainty into the decision making processes of both China and Taiwan. Dengan konsep ini, AS tidak memiliki arah kebijakan yang pasti (*uncertain*) untuk mendukung atau melawan baik Cina maupun Taiwan. Seluruh kebijakan AS akan bergantung pada konteks apa kebijakan tersebut dibuat.¹

1.6 Metode Penulisan

Paper ini menggunakan penulisan deskriptif, yakni penyampain informasi dengan penyajian data atau gambaran terperinci tentang situasi tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber pada data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau data tertulis, buku, jurnal, dan sumber lain yang didapat melalui media cetak maupun internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi dengan cara membaca dan menganalisa berbagai literatur yang sesuai dengan topik, yang kemudian dapat diaplikasikan dalam paper ini. Dalam penulisan ini menggunakan penyajian data dalam bentuk narasi. Melalui bentuk narasi ini akan menjabarkan dengan jelas dan terstruktur yang berdasarkan pada topik bahasan dalam penulisan ini mengenai hubungan antara Sino – US yang ditekankan pada pasca perang dingin dan studi kasus mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap *One China Policy*.

¹ Benson, Brett V, 2001, *Comprehending Strategic Ambiguity: US Security Commitment to Taiwan*, Duke University

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Review The Sino – US

Relationship dari Asia Pasific and World Politics (2007) oleh Derek McDougall

Sino - US relationship adalah sebutan untuk hubungan kerjasama yang telah dilakukan oleh Cina dan Amerika Serikat sejak tahun 1945. Didalam hubungan kedua Negara ini, terdapat isu-isu mendasar yang menjadi landasan hubungan seperti isu politik, ekonomi dan berkembang ke isu kontemporer seperti HAM. Dalam mengkaji hubungan ini dimulai dari *The Postwar Context, Post-Cold War Context, Post – Cold War Strategic Issues, Post – Cold War Economic Issues dan Human Rights Issues*

The Postwar Context

Di dalam konteks *Postwar*, hubungan Sino - US sudah dimulai dari tahun 1949 saat PRC (*Peoples Republic of China*) berdiri. Amerika Serikat melihat ini sebagai sebuah ancaman karena ada unsur komunisme yang ingin dibendung oleh AS dengan *containment policy*-nya. AS disini melihat Cina sebagai *major threat* bagi keamanan di Asia Pasifik dan begitu juga sebaliknya, Cina melihat AS sebagai *major threat* bagi Cina karena AS seolah membangun benteng penyerang disekeliling Cina. AS disini dikatakan menaruh perhatian besar pada Cina karena dipengaruhi oleh adanya hubungan konflik yang rumit antara Sino-Soviet. Hal ini semakin menarik perhatian AS disekitar

tahun 1960 dan AS kemudian mengintervensi Vietnam war karena melihat bahwa penyebaran komunisme disana akan mempermudah ekspansi Cina. Kemudian diakhir abad ke 60an saat pemerintahan Presiden Nixon, terjadi perubahan arah kearah peningkatan hubungan AS dengan Cina sebagai salah satu strategi untuk stabilitas politik internasional seperti memfasilitasi penyelesaian perang Vietnam. Dalam menanggapi hubungan ini, sebagian elemen radikal di Cina lebih memilih untuk menolak "*imperialism*" dan "*social imperialism*" tetapi disisi lain, elemen dominan setuju dengan terbukanya hubungan dengan AS karena alasan untuk menghindari konflik berkepanjangan dengan AS dan USSR.

Membaiknya hubungan AS dan Cina ini kemudian dikenal dengan "*rapprochement*" yang ditandai dengan penanda-tanganan *Shanghai Communique* di bulan Februari 1972. Dimulainya hubungan US-Sino ini juga dilihat sebagai sebuah cara pembendungan kekuatan komunis yaitu USSR dengan melakukan kerjasama dengan kekuatan komunisme lain yaitu Cina. Di tahun 1978 saat kepemimpinan Presiden Carter, AS dan PRC sepakat untuk melakukan normalisasi diplomatik penuh. Hal ini juga berkaitan dengan hubungan diplomatik AS dengan ROC (*Republic of China*) di Taiwan dengan dibuatnya *Taiwan Relations Act* tahun 1979. Hubungan Sino - US yang telah mengalami dinamika naik turun dimana Cina pernah diperlakukan special tetapi kemudian seiring perkembangan *great*

power lainnya hubungan Sino – US menurun karena keistimewaan terhadap Cina seolah berkurang. Meskipun berkurang, tetapi AS tetap menyatakan bahwa Cina memiliki posisi yang penting dan strategis.

The Impact of Tiananmen Square

Peristiwa pembunuhan massal di Tiananmen Square di 4 Juni 1989 merupakan peristiwa yang sangat berpengaruh bagi hubungan Sino - US dan mendapat respon dari masing-masing pihak. Respon dari AS mengenai peristiwa ini berkaitan dengan isu HAM. AS melalui kongres dan Presiden Bush kemudian membuat modifikasi dalam hubungan kedua Negara. Penjualan persenjataan dan kunjungan militer misalnya diberhentikan sementara. AS menekan Cina untuk segera menyelesaikan permasalahan HAM tersebut dan menjaga agar hal tersebut tidak terulang lagi. Meskipun demikian, Bush saat itu tidak melakukan intervensi ke Cina seperti yang ia lakukan ke Afganistan dan Korea Utara. Hal ini lah yang kemudian menuai kritik dari kongres karena menilai Presiden Bush dinilai melakukan hal yang bertolak belakang dari sebelumnya.

Respon dari Cina mengenai hal ini bisa dilihat dari sudut pandang *Marxist* dan *non-marxist*. Dari sudut pandang *Marxist*, muncul ketidaksukaan yang semakin menjadi oleh Cina terhadap AS yang dilihat mengintervensi permasalahan internalnya. Cina melihat ini sebagai urusan domestik yang tidak perlu dicampuri oleh AS dengan monopoli *capitalism*-nya. *Non-marxist* kemudian melihat hal ini sebagai urusan politik dan adu kepentingan yang terjadi.

Deng Xiaoping kemudian memperjelas posisi Cina dengan berbicara pada Nixon di Beijing tahun 1989 yang mengatakan bahwa AS telah ikut campur terlalu jauh dalam urusan domestik Cina dan mengancam kedaulatan serta kehormatan nasional Cina. Meskipun demikian, Deng tetap memandang bahwa hubungan Sino-US ini tetap harus diperkuat untuk menciptakan perdamaian dunia.

Post - Cold War Strategic Issues

Pada 1972, konflik Cina dengan USSR mengakibatkan adanya perubahan perilaku: AS sebagai pemimpin kekuatan imperialis mau membantu Cina dalam perjuangannya melawan Soviet "*imperialisme social*". Dengan adanya tekanan pada modernisasi ekonomi pasca Mao Cina setelah 1976, hubungannya dengan AS dilihat bisa menguntungkan dalam segi perdagangan, investasi, dan akses teknologi. Terbentuknya aspek-aspek yang membentuk hubungan Sino - US , juga melibatkan proses politik. Dalam isu strategis, terdapat kecenderungan dalam membandingkan isu ekonomi atau isu hak asasi manusia. Hal ini berlaku untuk AS dan Cina, di AS terdapat beberapa badan dan departemen yang mengurus tentang isu keamanan tentang Cina. sementara di Cina, proses politiknya kurang terbuka tapi lebih pluralistic. Cina menganut system politik authoritarian namun peran pemimpinnya kurang mendominasi daripada masa Mao atau Deng.

Selama pasca perang dingin, hubungan strategi antara Sino – US menjadi sangat problematic. Dengan runtuhnya USSR, AS kini menjadi Negara

dengan kekuatan terbesar di dunia sementara Cina memiliki pengaruh yang kuat di Asia Timur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran AS terhadap Cina yang tampaknya akan menjadi hegemon regional. Namun disaat yang bersamaan, hal ini justru sering membantu AS untuk memiliki hubungan kerjasama dengan Cina dalam yang mengatasi masalah regional. Oleh karena itulah Cina dinilai dilihat oleh dua sisi yakni *strategic partner* atau *stranger competitor* bagi AS. Pada akhirnya hubungan Sino - US kembali berkembang ketika Bush mendeklarasikan *war of terrorism* dan mendukung langkah langkah AS untuk melawan terorisme. Cina juga mendukung perang AS melawan Afganistan, dan membangun kerjasama dengan Pakistan yang saat itu berkonflik dengan India. Cina berharap untuk memenangkan dukungan AS pada kampanyanya melawan separatis muslim di Xianjian yang dikategorikan sebagai teroris.

Post – Cold War Economic Issues

Amerika Serikat telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan Cina dengan menjadi mitra dagang utama dan sumber investasi serta teknologi. Dalam isu ekonomi pada hubungan Sino – US ini banyak aspek politik yang mendasari hubungan keduanya. Antara Cina dan AS terdapat kekuatan politik yang menguntungkan bagi hubungan ekonomi keduanya atau menjadikannya sebagai sebuah ekspansi. Isu – isu politik penting muncul dalam konteks perluasan hubungan ekonomi Sino – US yang mengakibatkan hubungan ekonomi Sino – US mengalami penurunan. Situasi ini kemudian di

manfaatkan oleh kelompok kritis Cina di AS sebagai senjata dalam mendukung kebijakan yang lebih proteksionis. Perdebatan antara kelompok yang berbeda di AS dilihat pada awal hingga pertengahan tahun 1990 an yang mengacu pada perpanjangan status Cina sebagai Most Favored Nation (MFN) dalam perdagangan.

MFN adalah istilah yang digunakan untuk menyumbangkan negara yang memiliki hubungan perdagangan normal dengan AS. Dalam kasus Cina status MFN diperoleh pada tahun 1980 dan perpanjangan status tidak diperdebatkan hingga 1989. Setelah koalisi aktivis HAM dan kritikan Cina dari berbagai latar belakang mencoba untuk memblokir pembaharuan MFN atau memaksakan kondisi. Namun kedua Presiden AS yakni George H.W Bush dan Bill Clinton memutuskan untuk tetap mempertahankan status MFN Cina. Setelah bertahun – tahun melakukan negoisasi, momentum untuk mencapai kesepakatan dikembangkan pada tahun 1998 dan 1999 yang menjadi titik awal untuk memperkuat hubungan AS dan Cina. Hubungan ekonomi Sino – US kemudian memfokuskan pada transfer teknologi yang mengakibatkan muncul konflik batin antara AS dan Cina. AS dan Cina tetap mempertahankan hubungan ekonomi keduanya mengingat hubungan ekonomi Sino – US memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan kedua negara ini.

Human Rights Issues

Isu-isu hak asasi manusia telah menjadi fokus penting pada pasca - perang dingin dalam hubungan Sino – US.

Pendekatan terhadap masalah hak asasi manusia dalam hubungan Sino - US dibentuk oleh tradisi demokrasi liberal yang mendasarinya. Apapun realitas kebijakan luar negeri AS, ada harapan bahwa pemerintah AS akan menggunakan pengaruh mereka untuk mencapai tujuan moral. Di sisi lain Cina biasanya melakukan resistensi terhadap upaya AS untuk mempengaruhi situasi hak asasi manusia di Cina. Cina melihat HAM sebagai masalah dalam negeri yang tidak harus tunduk pada pengaruh eksternal. Cina dipaksa untuk memberikan perhatian untuk isu-isu ini untuk menghindari penderitaan konsekuensi yang merugikan dalam hubungan strategis dan ekonomi dengan AS.

Penekanan AS pada hak-hak sipil dan politik juga fokus pada satu tingkat pada hak-hak individu, AS juga khawatir tentang represi politik di daerah seperti Tibet dan Xinjiang dan batas-batas ekspresi politik di Hong Kong sejak pengembalian wilayah ke Cina pada tahun 1997. Untuk bagiannya China berpendapat bahwa pendekatan AS terlalu dipengaruhi oleh individualisme Barat. Dari perspektif Cina ekspresi politik perlu dibatasi jika bisa membahayakan hak-hak sosial dan ekonomi dari sebagian besar. Isu HAM kemudian menjadi penting antara hubungan Sino – US. HAM diharapkan dapat menguatkan hubungan ekonomi antara Sino – US yang dialiri oleh nilai – nilai kebebasan pasca perang dingin.

2.2 Studi Kasus Kebijakan Amerika Serikat Terhadap One China Policy

A. Awal dikeluarkannya kebijakan One China Policy

Republik Rakyat Cina (RRC) adalah suatu negara yang terkenal sebagai negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Republik Cina dikuasai oleh orang-orang nasionalis Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek yang sebelumnya pernah dipimpin oleh Chun Yat Shen. Namun, terjadi perang sipil di Cina ketika orang-orang berhaluan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong masuk dan ingin menguasai Cina. Akhirnya kekalahan pun harus diterima oleh orang-orang sosialis yang lantas pergi ke pulau Formosa untuk membangun negara sendiri yang bernama Taiwan.

Perginya orang-orang sosialis ke Taiwan tidak serta merta membuat kondisi perpolitikan di Cina membaik. Justru hubungan diplomatik diantara Cina dan Taiwan terus mengalami pergolakan. Sejak berpisah dari Cina, Taiwan sampai saat ini diakui sebagai suatu negara hanya oleh beberapa negara saja bahkan PBB hanya mengakuinya sebagai provinsi dari negara Cina. Pemerintah Cina, lantas mengeluarkan kebijakan yang dinamakan *One China Policy* dimana kebijakan ini mengeluarkan bunyi yang isinya menunjukkan bahwa hanya ada satu Cina yang berdaulat. Jadi, keberadaan Taiwan merupakan bagian dari Cina dan tidak dianggap negara yang membentuk dirinya dia sendiri di luar Cina. Pemerintah Cina juga mengakui atas wilayah seperti Hongkong, Macau dan Taiwan sebagai negara yang terintegrasi dengan Cina. Sehingga hubungan kerjasama atau

diplomasi dengan Cina harus melalui satu pemerintahan saja dan hal ini harus setidaknya disetujui oleh negara yang ingin menjalin kerjasama dengan Cina.

Kebijakan *One China Policy* membuat Taiwan harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Cina. Namun, ternyata kebijakan ini mendapat reaksi negatif dari Taiwan. Mereka tidak menginginkan untuk bergabung ke dalam Cina di bawah satu pemerintahan. Taiwan menganggap bahwa daerahnya adalah negara yang berdaulat karena secara *de facto*, Taiwan sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah negara. Namun, reaksi dari Taiwan tidak serta merta membuat Cina harus membatalkan kebijakan yang telah dibuat. Cina malah membuat aturan main yang ketat bagi para negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Bahwa tidak boleh menjalin hubungan dengan Taiwan apabila negara lain ingin membangun hubungan diplomatik dengan Cina. Atau dalam kata lain, negara yang ingin bekerjasama dengan Cina harus mematuhi kebijakan *One China Policy* tersebut.

Upaya tersebut pada awalnya disetujui oleh AS yang menjadi mitra kerjasama Cina. AS menyetujui untuk mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan Taiwan untuk menghormati kebijakan yang diambil pemerintah Cina. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Jimmy Carter telah menyepakati kebijakan Cina tersebut dengan ditandatanganinya *joint communiqué* di tahun 1979. Namun ternyata AS tidak sepenuhnya memenuhi

kesepakatan yang telah dibuat. Satu bulan sejak ditandatanganinya *joint communiqué* tersebut, AS malah ikut menyetujui *Taiwan Relations Act* yang kemudian memicu tanda tanya besar bagi Cina. Selain itu, AS sudah mengecewakan pemerintah Cina yang lantas membuat hubungan AS dan Cina hingga saat ini menjadi kurang stabil.

B. Perjanjian Pertahanan Bersama Amerika Serikat dan Taiwan

"It (Taiwan) may appear to carry a little weight on the grand chess board of great powers. But it is a beacon for a future democratic China, and it is also a critical piece in the security structure of the Asia Pacific Region. Despite its relatively small size, Taiwan is worthy protecting and must be defended." – Dr. Alexander Chieh-cheng Huang

Perjanjian kerjasama di bidang pertahanan antara Amerika Serikat dan Taiwan telah dilakukan semenjak Perang Dunia ke-2 hingga saat ini. Dari waktu ke waktu perjanjian Amerika Serikat – Taiwan telah mengalami beberapa reformasi (perubahan) dan semakin diperkuat hingga sekarang. Dimulai dari Perang Dunia ke-2 Amerika Serikat memberikan beberapa bantuan militer kepada Taiwan yakni diantaranya, The American Volunteer Group (Flying Tigers) yang merupakan bantuan AS kepada Taiwan untuk mendukung pemerintahan nasionalis Cina melawan Jepang di perang Sino – Jepang ke-2, pasukan ini dipimpin oleh General Claire Chennouli. Amerika Serikat kemudian mengirimkan US Naval Group China (Sino – American Cooperative

Organization) yang dipimpin oleh Admiral Milton Miles operasi ini merupakan operasi intelijen mutual antara AS dan Taiwan. Pada awal tahun 1950an juga melakukan Cooperation in Land Operation Between Chinese, British and American Forces in South Asia against Japanese in the China – Burma – India Theater.

Kepentingan strategis dari Amerika Serikat kepada Taiwan ini menurut Huang (2010) adalah melakukan kebijakan *containing* terhadap ekspansi komunis di Asia Pasifik pada masa Perang Dingin. Pemerintah Taiwan menyatakan bahwa kepentingan politik, keamanan dan ekonomi Amerika Serikat sangat sejalan dengan perdamaian dan stabilitas keamanan di Pasifik Barat sehingga dengan menjalin kerjasama dengan Taiwan dapat memenuhi tujuan tersebut. Untuk mempererat kerjasama AS – Taiwan setelah perang dunia kedua, ditandatangani US – ROC Mutual Defense Treaty tahun 1954 yang aktif hingga 1 Januari 1980 dan US Military Assistance Advisory Group (MAAG)

Taiwan Relations Act dan Six Assurances

Setelah US – ROC Mutual Defense Treaty Amerika Serikat dan Taiwan melakukan mempererat kembali hubungan diplomatiknya setelah Kongres Amerika Serikat meluluskan Taiwan Relations Act yang mengatur hubungan Amerika Serikat – Taiwan setelah berhentinya perjanjian US - ROC Mutual Defense Treaty setelah 1979. *“The US would consider any effort to determine future of Taiwan by other than peaceful means, including by boycotts or*

embargoes, a threat to peace and security of the Western Pacific area and grave concern to the United States;... the United States will make available to Taiwan such defense articles and defense service in such quantity as may be necessary to enable Taiwan to maintain a sufficient self-defense capability”².

Perjanjian ini juga termasuk perjanjian penjualan senjata dari Amerika Serikat kepada Taiwan sebagai bentuk bantuan pertahanan diri Taiwan. Terkait kerjasama pertahanan AS – Taiwan dan juga perdagangan senjata yang dilakukan kedua negara tersebut, Republik Rakyat Cina melihat ini sebagai penghalang hubungan RRC dengan Amerika Serikat (Huang, 2010). RRC menuntut pemerintahan Amerika Serikat untuk menyelesaikan hal ini yang kemudian menggiring kepada Komunike 17 Agustus tahun 1982 yang berisi respon Amerika Serikat bahwa *“US does not seek to carry out a long term policy of arms sales to Taiwan, either in qualitative or in quantitative terms, the level of those supplied in recent years since the establishment of diplomatic relations between the US and China and that it intend to reduce gradually its sales of arms to Taiwan leading over period of time to final resolution.”³* Menurut Huang, sebelum ditandatanganinya komunike tersebut, Amerika Serikat telah

² “Taiwan Relations Act: Public Law 96-9, 96th Congress,” January 1, 1979, teks lengkap dapat dilihat di The American Institute in Taiwan (AIT) http://www.ait.org.tw/eb/about_it/tra/; diakses pada 26 April 2015

³

memperlengkapi Taiwan dengan Six Assurances yakni jaminan Amerika Serikat terhadap Republik Cina, keenam jaminan tersebut adalah⁴:

1. Bahwa Amerika Serikat menyetujui untuk tidak memberikan tanggal penghentian penjualan senjata kepada Republik Cina (Taiwan),
2. Amerika Serikat tidak akan mengadakan konsultasi lanjutan (prior consultations) kepada Republik Cina terkait penjualan senjata,
3. Amerika Serikat tidak akan memainkan peran sebagai mediator antara Republik Rakyat Cina dengan Republik Cina,
4. Amerika Serikat tidak akan merevisi Taiwan Relations Act,
5. Amerika Serikat tidak akan mengubah posisinya terkait kedaulatan Taiwan, dan
6. Amerika Serikat tidak akan memaksa Taiwan untuk mengadakan negosiasi dengan Republik Rakyat Cina.

Sehingga dengan ini, Taiwan dan Amerika Serikat tetap meneruskan kerjasamanya dalam bidang keamanan baik militer dan juga penjualan senjata. Dengan disetujuinya Six Assurances ini, Amerika Serikat menjamin untuk tidak menjadi mediator ataupun menekan Republik Cina untuk bernegosiasi dengan RRC.

⁴ Menurut Harvey Feldman, Direktur James Lilley menyatakan six assurances secara oral kepada Presiden Republik Cina Chiang Ching-Kuo.

C. Hubungan Sino – US Terkait One China Policy pada era George H.W Bush dan Barrack Obama

One China Policy in Bush Administration

Pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, kebijakan Amerika Serikat terhadap Cina dan Taiwan terkait One China Policy lebih mendukung Taiwan. Bush menganggap Cina bukan sebagai *strategic partner*, namun lebih menampilkan kesan Cina sebagai “*America's enemy*”⁵. Bush meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan, menegaskan komitmen untuk pertahanan Taiwan, serta mengubah arah strategi pertahanan Amerika Serikat dari Eropa menjadi fokus pada Asia Pasifik sebagai bentuk *counter* terhadap kekuatan militer Cina. Cina terus meningkatkan pembelian persenjataan dari Rusia sehingga Amerika melihat hal ini sebagai ancaman, tidak hanya untuk Taiwan, tetapi juga ancaman bagi stabilitas keamanan di wilayah Asia.⁶ Amerika juga menyatakan keberatan terhadap rencana Uni Eropa untuk mencabut embargo penjualan senjata pada Cina, karena Amerika khawatir hal ini semakin meningkatkan persenjataan Cina. Jika Cina memiliki persenjataan militer yang kuat, Cina akan dengan mudah menyerang Taiwan. Amerika Serikat melakukan *deterrence* kepada Cina sehingga Cina tidak menyerang Taiwan secara langsung.

⁵ The Contradictions of Bush's China Policy (<http://www.nytimes.com/2001/06/02/opinion/the-contradictions-of-bush-s-china-policy.html>)

⁶ US Department of Defense, *Annual Report on the Military Power of the People's Republic of China*, 2004

Meskipun khawatir dengan peningkatan persenjataan Cina, pemerintahan Bush juga tidak mendukung begitu saja upaya kemerdekaan Taiwan. Bush menolak untuk mendukung upaya pemerintah Taiwan mengubah *status quo*. Terlebih lagi, Taiwan melakukan aksi-aksi provokatif yang membuat Cina semakin memperkuat persenjataannya. Ini merupakan bentuk implementasi konsep kebijakan *strategic ambiguity*, dimana AS mempertahankan dukungan pada Cina melalui *One China Policy* sambil tetap menekan persenjataan Cina, dan menolak upaya kemerdekaan Taiwan sambil tetap memberikan perlindungan terhadap pertahanan Taiwan. Bush merasa tidak perlu menjadi pihak mediator untuk melakukan mediasi antara Cina dan Taiwan ataupun mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi perdamaian kedua pihak.

One China Policy in Obama Administration

Selama masa kampanye pemilihan presiden, Obama menyatakan Amerika Serikat tidak memiliki kewajiban dalam membela Taiwan. Obama merasa bahwa Cina adalah partner perdagangan yang lebih penting. Obama juga mengatakan siap menjadi *host talk* antara militer Cina dan Taiwan. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat selama ini Amerika Serikat tidak pernah *concern* untuk mendorong Taiwan bernegosiasi dengan Cina.⁷ Pada awal pemerintahannya, Obama menekankan bahwa Amerika Serikat tidak mendukung

kemerdekaan Taiwan dari Cina. Obama berhasil meredakan ketegangan antara Cina dan Taiwan.⁸ Namun, Obama terlihat cenderung mendukung Cina, terbukti dengan Obama menunjuk penasihat kebijakan yang pro Cina. Bahkan, salah satu penasihat keamanan nasional, Zbigniew Brzezinski menyatakan Taiwan adalah *endangered species* yang menjadi hambatan Amerika Serikat dalam menjalin hubungan dengan Cina.

Kebijakan Presiden Obama berubah pada periode kedua pemerintahannya. Obama kembali menekankan pentingnya hubungan dengan Taiwan. Obama menandatangani kebijakan yang mendukung Taiwan ikut serta dalam *International Civil Aviation Organization*. Obama juga fokus pada diskusi yang serius pada hubungan bilateral mengenai *US-Taiwan Free Trade Agreement*. Hubungan ini berlanjut dengan dukungan AS terhadap keanggotaan Taiwan pada *Trans-Pacific Partnership Agreement*. Hubungan dengan Taiwan dalam bidang militer kembali berlanjut ketika Presiden Obama menandatangani penjualan misil ke Taiwan. Hal ini memicu protes keras Cina pada Amerika Serikat.⁹

Perubahan kebijakan Obama ini disebabkan oleh fokus Amerika Serikat yang menekankan pada doktrin Asia Pasifik. Artinya, Obama fokus mengembangkan pengaruh AS di Asia

7

<http://nationalinterest.org/commentary/obama-turns-toward-taiwan-9048>

8

<http://www.washingtontimes.com/news/2009/nov/17/obama-affirms-one-china-policy/>

9

<http://www.reuters.com/article/2014/12/19/us-china-usa-taiwan-idUSKBN0JXONK20141219>

Pasifik. Saat ini, kekuatan Cina di Asia sudah sangat besar. AS khawatir, jika hal ini dibiarkan, pengaruh Cina di Asia Pasifik bisa saja mengalahkan pengaruh AS. Untuk melawan pengaruh Cina, AS perlu mencari aliansi, seperti Jepang, India, Korea Selatan, ASEAN, dan salah satunya termasuk Taiwan. Dengan adanya aliansi, AS berharap pengaruhnya di Asia Pasifik menjadi lebih besar daripada pengaruh Cina. Bahkan, AS secara spesifik pada pemerintahan Obama mengutamakan *Trans-Pacific Partnership* dengan mengajak Taiwan tetapi tidak mengajak Cina sebagai anggota.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Sino – US yang berawal dari kebijakan re – approachment yang dilakukan oleh Nixon dapat berjalan dengan baik karena mitra dagang yang kuat terutama dalam ekspor dan impor. Namun konflik muncul antara keduanya salah satunya karena Taiwan. Taiwan yang berkonflik dengan Cina mengakibatkan Cina mengeluarkan kebijakan One China Policy. Namun Kedekatan AS dengan Taiwan tidak dapat dilepaskan terbukti dengan penandatanganan *Taiwan Relations Act*.

Kebijakan Presiden Obama berubah pada periode kedua pemerintahannya. Obama kembali menekankan pentingnya hubungan dengan Taiwan. Obama menandatangani kebijakan yang mendukung Taiwan ikut serta dalam

Perjanjian ini juga termasuk perjanjian penjualan senjata dari Amerika Serikat kepada Taiwan sebagai bentuk bantuan pertahanan diri Taiwan. Terkait kerjasama pertahanan AS – Taiwan dan juga perdagangan senjata yang dilakukan kedua negara tersebut, Republik Rakyat Cina melihat ini sebagai penghalang hubungan RRC dengan Amerika Serikat.

Pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, kebijakan Amerika Serikat terhadap Cina dan Taiwan terkait One China Policy lebih mendukung Taiwan. Bush menganggap Cina bukan sebagai *strategic partner*, namun lebih menampilkan kesan Cina sebagai “*America’s enemy*”. Bush meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan, menegaskan komitmen untuk pertahanan Taiwan, serta mengubah arah strategi pertahanan Amerika Serikat dari Eropa menjadi fokus pada Asia Pasifik sebagai bentuk *counter* terhadap kekuatan militer Cina. Pada awal pemerintahannya, Obama menekankan bahwa Amerika Serikat tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dari Cina. Obama berhasil meredakan ketegangan antara Cina dan Taiwan. Namun, Obama terlihat cenderung mendukung Cina, terbukti dengan Obama menunjuk penasihat kebijakan yang pro Cina.

International Civil Aviation Organization. Obama juga fokus pada diskusi yang serius pada hubungan bilateral mengenai *US-Taiwan Free Trade Agreement*. Hubungan ini berlanjut dengan dukungan AS terhadap keanggotaan Taiwan pada *Trans-Pacific*

Partnership Agreement. Hubungan dengan Taiwan dalam bidang militer kembali berlanjut ketika Presiden Obama menandatangani penjualan misil ke Taiwan. Hal ini memicu protes keras Cina pada Amerika Serikat.

Daftar Pustaka

Benson, Brett V, 2001, *Comprehending Strategic Ambiguity: US Security Commitment to Taiwan*, Duke University

McDougall, Derek. 2007. *Asia Pasific in World Politics*. USA : Lynne Rienner

Huang, A. C. (2010, February). *The United States and Taiwan's Defense Transformation*.

US Department of Defense, *Annual Report on the Military Power of the People's Republic of China*, 2004

Taiwan Relations Act: Public Law 96-9, 96th Congress," January 1, 1979, teks lengkap dapat dilihat di The American Institute in Taiwan (AIT)

http://www.ait.org.tw/eb/about_it/tra/;

diakses pada 26 April 2015